



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, November 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650117 199010 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Jawa Tengah tahun 2024 akan fokus pada pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Renja 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan diselaraskan dengan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, RPD Tahun 2024-2026, RENSTRA Tahun 2024-2026, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 - Kepmendagri 050-3708.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dengan Tema **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”** diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

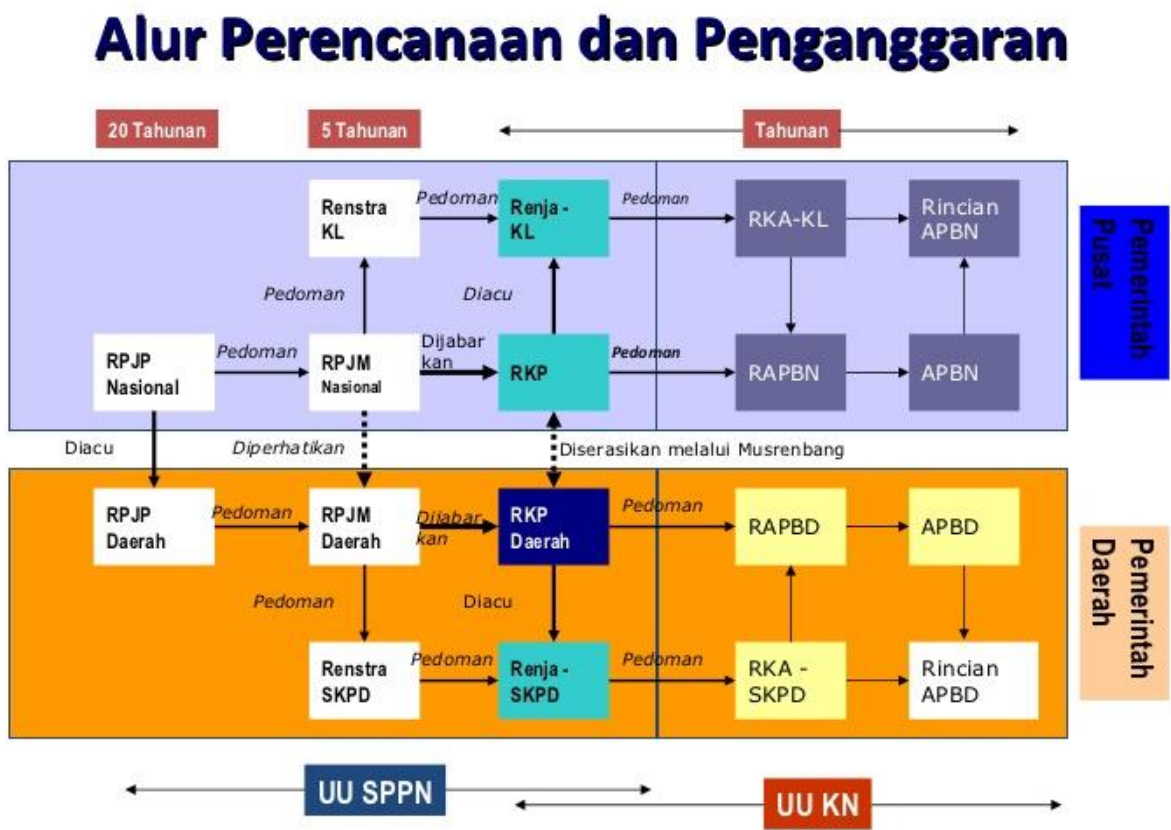
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.2

Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 87);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 55).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan Dinas berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas beserta indikasi, pagu anggaran dan target indikator kinerja Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
	3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
	4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
BAB V	P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra tahun 2018-2023. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis meliputi :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka);
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu :

1. Produksi perikanan (ton/tahun),
2. Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
3. Produksi garam (ton/tahun),
4. Nilai Tukar Nelayan (NTN),
5. Nilai Tukar Pembudidaya (NTP).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Pada tahun 2021 merupakan tahun transisi mulai berlakunya Permendagri No 90 Tahun 2019 sehingga terdapat perubahan nomenklatur program dan/atau kegiatan. Tahun 2022 program Dinas kelautan dan Perikanan melaksanakan 6 Program dan 95 kegiatan. Berikut perubahan nomenklatur program prioritas tersebut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pilihan									
	Urusan Kelautan dan Perikanan									
		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	%	1.5	1.4	1.4	100	1.5	1.5	100
		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	81	80	84,25	105,31	81	81	100
		Produksi Perikanan	Ton	1.023.928,09	1.018.833,92	866.372,65	85,03	1.023.928,09	1.023.928,09	100
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	37,07	38,18	37,25	97,56	37,07	37,07	100
		Produksi Garam	Ton	207.505,12	373.463,29	135.792,09	36,36	207.505,12	207.505,12	100
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	108	107	104,86	97,09	108	108	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	101	101	109,95	109,95	101	101	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,1	0,1	0,04	40	0,1	0,1	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	100	100	90	90	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	40	100	90	90	40	40	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	40	72,73	90,91	125	40	40	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	100	90,91	90,91	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	40	72,73	72,73	100	40	40	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	100	90,91	90,91	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	90,91	90,91	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	90,91	90,91	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	40	63,64	63,64	100	40	40	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending	%	100	90,91	90,91	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	40	100	100	100	40	40	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil									
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	502.823,78	500.322,17	333.361,47	66,63	502.823,78	502.823,78	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap	Dokumen	150	100	519	300	150	150	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi									
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Jenis	11	11	11	100	11	11	100
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	%	50	45	45	100	50	50	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Asemtoyong Kelas B)	Jenis	8	11	9	81,82	8	8	100
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	%	40	36	85,45	237,36	40	40	100
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	%	50	45	45	100	50	50	100
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan	%	40	36	36	100	40	40	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tawang Kelas B)								
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Morodemak Kelas A)	%	50	45	45	100	50	50	100
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Jenis	11	11	11	100	11	11	100
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Jenis	11	11	10	90,91	11	11	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	%	40	36	36	100	40	40	100
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Lohgending Kelas A)	%	50	45	45	100	50	50	100
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Larangan Kelas B)	%	40	36	36	100	40	40	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Larangan Kelas B)	Jenis	40	11	10	90,91	40	40	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan produksi benih	%	25	2	2,5	125	25	25	100
		Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0,2	0,2	0,2	100	0,2	0,2	100
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
		Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya	Unit	3	3	3	100	3	3	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut									
		Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (BLPKIL Kelas A)	Kasus	300	250	270	108	300	300	100
		Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (BLPKIL Kelas A)	%	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (BBIAPL Kelas A)	%	60	60	61	101,67	60	60	100
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (BBIAPL Kelas A)	%	40	40	43	107,50	40	40	100
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	521.104,31	518.522,75	533.011,18	102,79	521.104,31	521.104,31	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL									
		Persentase peningkatan produksi garam	%	25	0,1	0,05	50	25	25	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	30	5	5	100	30	30	100
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	17,6	2,5	2,5	100	17,6	17,6	100
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	25	1	1	100	25	25	100
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)	%	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	25	1	1	100	25	25	100
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)	%	1	1	1	100	1	1	100
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	25	0,5	0,57	114	25	25	100
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)	%	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil									
		Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	5	5	5	100	5	5	100
		Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya	Kelompok	2	2	2	100	2	2	100
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi									
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Lokasi	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Barat)	Ha	3	3	3	100	3	3	100
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Timur)	Ha	2	2	2	100	2	2	100
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Selatan)	Ha	2	2	2	100	2	2	100
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi									
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Barat)	Dokumen	3	3	3	100	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Timur)	Dokumen	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Selatan)	Dokumen	12	12	12	100	12	12	100
	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
		Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan	%	72	71	71	100	72	72	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan								
		Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp	%	45	40	40	100	45	45	100
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	2	2	2	100	2	2	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	2	2	2	100	2	2	100
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	2	2	2	100	2	2	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil									
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	250	9	77	300	250	250	100
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	Kelompok	45	40	60	150	45	45	100
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Barat)	Kasus	4	5	5	100	4	4	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Timur)	Kasus	4	5	5	100	4	4	100
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	4	5	5	100	4	4	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan	Kasus	40	9	20	222,22	40	40	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Barat)	Kasus	4	5	5	100	4	4	100
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Timur)	Kasus	4	5	5	100	4	4	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	4	5	5	100	4	4	100
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
		Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	50	2	2	100	50	50	100
		Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	25	2	7,12	356	25	25	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
		Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Unit	6.550	6.500	8.064	124,06	6.550	6.550	100
		Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar	Dokumen	3	3	4	133,33	3	3	100
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	55.000	50.000	48.776	97,55	55.000	55.000	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah reakreditasi ISO (BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	2	3	150	1	1	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tegalsari Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Asemdayong Kelas B)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Wonokerto Kelas B)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Klidanglor Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tawang Kelas B)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Morodemak Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tasikagung Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Lohgending Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BLPKIL Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BBIAPL Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Larangan Kelas B)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPMHP Kelas A)	%	100	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	2	2	100	2	2	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemboyong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemboyong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisa si (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2018–2023. Adapun program-program yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari keenam program yang dilaksanakan, ditetapkan indikator utama pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap
 - b) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari
 - c) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemboyong
 - d) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto
 - e) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor
 - f) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang
 - g) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak
 - h) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo
 - i) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung
 - j) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa
 - k) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending
 - l) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan
 - b) Persentase peningkatan produksi benih
 - c) Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - a) Persentase peningkatan produksi garam
 - b) Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir
 - c) Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
 - d) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)
 - e) Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)
 - f) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)
 - g) Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)
 - h) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)
 - i) Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu

- b) Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan
- 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - a) Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan
 - b) Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp
 - c) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah
 - d) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah
 - e) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah
- 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah
 - b) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
 - c) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tegalsari Kelas A)
 - d) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Asemdayong Kelas B)
 - e) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Wonokerto Kelas B)
 - f) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Klidanglor Kelas A)
 - g) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tawang Kelas B)
 - h) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Morodemak Kelas A)
 - i) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)
 - j) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tasikagung Kelas A)
 - k) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)
 - l) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Lohgending Kelas A)
 - m) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BLPKIL Kelas A)
 - n) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BBIAPL Kelas A)
 - o) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Larangan Kelas B)
 - p) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)
 - q) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)
 - r) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)

s) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPMHP Kelas A)

Realisasi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi tahun 2023 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap			0,1	0,1	0,04	0,1	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari			100	100	90	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong			100	40	90	40	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto			72,73	40	90,91	40	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor			90,91	100	90,91	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang			72,73	40	72,73	40	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak			90,91	100	90,91	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo			90,91	100	90,91	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung			90,91	100	90,91	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa			63,64	40	63,64	40	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending			90,91	100	90,91	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan			100	40	100	40	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan			100	100	100	100	
	Persentase peningkatan produksi benih			2	25	2,5	25	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya			0,2	0,2	0,2	0,2	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase peningkatan produksi garam			0,1	25	0,05	25	
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir			5	30	5	30	
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif			2,5	17,6	2,5	17,6	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)			1	25	1	25	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)			1	1	1	1	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)			1	25	1	25	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)			1	1	1	1	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)			0,5	25	0,57	25	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)			1	1	1	1	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan			71	72	71	72	
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp			40	45	40	45	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah			2	2	2	2	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah			2	2	2	2	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah			2	2	2	2	
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu			2	50	2	50	
	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan			2	25	7,12	25	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Asemboyong Kelas B)			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi Capaian Tahun 2023	Catatan Analisis
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT BPMHP Kelas A)			100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka kami uraikan sebagai berikut:

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan antara lain :

1. Masih belum optimalnya peningkatan produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan produksi garam rakyat dikarenakan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurang efisiennya sistem distribusi logistik ikan Jawa Tengah.
2. Masih tingginya resiko usaha, belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan, serta belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman;
3. Masih belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;
4. Menurunnya daya dukung lingkungan akibat kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) yang diiringi dengan belum seimbang upaya rehabilitasi yang dilakukan.

b) Tantangan

1. Optimalisasi hasil kelautan dan perikanan terutama pada usaha skala kecil dan menengah;
2. Rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir;
3. Digitalisasi sektor kelautan dan perikanan;
4. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan;
5. Keterbatasan infrastruktur dan penyedia logistik di sentra perikanan;
6. Keterbatasan teknologi informasi untuk logistik perikanan;
7. Fasilitasi kemudahan perijinan;
8. Produksi komoditas unggulan perikanan budidaya di Jawa Tengah;
9. Inovasi, diseminasi dan pendampingan teknologi di Jawa Tengah;
10. Produksi garam yang masih bergantung cuaca, serapan pasar ke garam rakyat masih rendah;
11. Rekomendasi perijinan ruang laut;
12. Pengelolaan kawasan konservasi.

c) Peluang

1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan kelautan dan perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM;
4. Pengembangan infrastruktur.

d) Formulasi isu-isu penting

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan berpotensi memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan dan garam rakyat;
3. Masih rendahnya Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan dikarenakan belum optimalnya perlindungan usaha;
4. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah yang masih dibawah rata-rata Angka Konsumsi Ikan Nasional dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, rendahnya kompetensi sdm poklhasar, belum optimalnya jaminan mutu produk perikanan serta belum terbentuknya jejaring pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dikarenakan minimnya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bagi hasil yang tidak proporsional, praktik ijon, serta belum optimalnya jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha;
6. Terjadinya *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* data produksi perikanan, serta minimnya teknologi penangkapan ikan;
7. Tingginya harga pakan, wabah dan hama penyakit ikan, menurunnya kualitas benih dan induk, rendahnya teknologi serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
8. Kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi, alih fungsi lahan, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan SDKP, serta adanya ketidaksesuaian antara rencana alokasi ruang laut dengan pemanfaatan ruang laut;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Reviu tersebut tertuang dalam tabel 5 berikut :

Tabel 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
		Bidang Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	5 %	19.768.766		Bidang Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	5 %	19.768.766
			Persentase Lokasi Yang dilindungi Sumber Daya Ikannya	44,44 %	44.225			Persentase Lokasi Yang dilindungi Sumber Daya Ikannya	44,44 %	44.225
			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Nelayan	108,27	1.137.715			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Nelayan	108,27	1.137.715

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	1.216.749		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	1.216.749
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72,72 %	733.964		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72,72 %	733.964
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81,82 %	534.952		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81,82 %	534.952
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	70 %	1.105.369		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	70 %	1.105.369

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	62,62 %	886.910		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	62,62 %	886.910
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81 %	905.895		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81 %	905.895
		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	481.375		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	481.375
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	1.120.316		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	1.120.316

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	63,63 %	587.181		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	63,63 %	587.181
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	63 %	4.746.790		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	63 %	4.746.790
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	581.985		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	581.985

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	2.220.595		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	2.220.595
			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Pembudidaya	111,27	68.970			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Pembudidaya	111,27	68.970
		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100 %	853.195		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100 %	853.195

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5 %	9.976.701		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5 %	9.976.701
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANA					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANA				
		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Jumlah Produksi Olahan Ikan	160.000 Ton	1.162.075		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Jumlah Produksi Olahan Ikan	160.000 Ton	1.162.075
		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4 %	1.167.950		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4 %	1.167.950

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Produksi Garam	1 %	760.245		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Produksi Garam	1 %	760.245
			Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5 %	715.287			Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5 %	715.287

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	773.390		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	773.390
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi	1,39 %	300.554		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi	1,39 %	300.554
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	792.224		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	792.224

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70 %	664.642		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70 %	664.642

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		Sekretariat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	50.599.009		Sekretariat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	50.599.009
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	801.678			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	801.678

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	342.100		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	342.100
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyo ng Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	106.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyo ng Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	106.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	168.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	168.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	90.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	90.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema k Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	154.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema k Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	154.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	316.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	316.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	898.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	898.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	172.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	172.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	131.200		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	131.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	161.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	161.000
		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	276.500		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	276.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	608.000		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	608.000
		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	253.000		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	253.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	77.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	77.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	94.000		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	94.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	138.280		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	138.280

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil telaah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Brebes, Kebumen, Demak, Pati dan Blora	Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	19 Paket	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA/ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kabupaten Purworejo, Klaten, Kebumen, Banyumas, Magelang, Batang, Karanganyar, Purbalingga, Temanggung, Banjarnegara, Grobogan, Sragen, Semarang, Cilacap, Blora dan Kota Magelang	Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	43 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi Pembangunan Nasional:

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

Misi Presiden :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Agenda Prioritas Pembangunan :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Kelautan (RPJMN 2020-2024)

Arah kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Nasional Kelautan tahun 2020-2024, dapat dilihat pada gambar 3.1. dan 3.2.



Gambar 1. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024



Gambar 2. Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
- Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;
 - b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun; dan
 - c. Menciptakan kepastian kebijakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Menjadikan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan		Persentase Luasan Mangrove Yang Direhabilitasi	(%)	0,75
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	(%)	62

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	(%)	1,0
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	927.350
		Meningkatnya Produksi Garam	Produksi Garam	Ton	133.320
3	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	82
4	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	107,78
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	40,12
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Angka	105
		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Komponen pengukuran belum tercakup semuanya	10	Data terkait produksi dan konsumsi nelayan dan pembudidaya tidak tersedia	Nilai tukar tidak mencerminkan angka sebenarnya	Koordinasi dengan BPS	BPS	1 tahun
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Konsumsi ikan Masyarakat tidak naik	10	- Masyarakat belum memahami pentingnya konsumsi ikan - Inovasi olahan ikan masih	Masyarakat enggan mengonsumsi ikan	- Sosialisasi Gemarikan - Pelatihan diversifikasi pengolahan ikan	DKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				belum banyak diketahui Masyarakat				
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Data produksi perikanan tangkap belum lengkap	10	Data terkait produksi dan konsumsi nelayan tidak tersedia	Nilai tukar tidak mencerminkan angka sebenarnya	Koordinasi dengan BPS	BPS	1 tahun
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Data produksi perikanan budidaya belum lengkap	10	Data terkait produksi dan konsumsi pembudidaya tidak tersedia	Nilai tukar tidak mencerminkan angka sebenarnya	Koordinasi dengan BPS	BPS	1 tahun
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	Ketersediaan lahan negara yang sesuai dengan pertumbuhan mangrove	9	Ketersediaan data lahan negara yang sesuai untuk mengrove belum detail	Kawasan mangrove di lahan negara tidak terehabilitasi	Koordinasi dengan stakeholder terkait	DKP	1 tahun
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	Tidak terawasinya wilayah pengelolaan	12	Frekuensi operasi pengawasan yang rendah	Adanya pelanggaran IUU	- Koordinasi dan operasi pengawasan Bersama	DKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	perikanan				- Sosialisasi		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Pimpinan dan staf tidak memahami reformasi birokrasi	9	Pelaksanaan pemerintahan tidak berubah	Pelayanan berkinerja buruk	Sosialisasi	DKP	1 tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan yang tidak standar	12	Pimpinan dan staf tidak memahami pentingnya	Ketidakpuasan masyarakat tinggi	Sosialisasi	DKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Daerah				pelayanan Masyarakat				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Pimpinan dan staf tidak menggunakan MR dalam pelaksanaan tugas	12	Sosialisai dan pemahaman yang kurang	Risiko tidak terkelola	Melakukan sosialisasi	DKP	1 tahun
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Target produksi perikanan tidak tercapai	12	Rendahnya produksi perikanan	Kontribusi perikanan rendah	Sosialisasi	DKP	1 tahun
Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Musim hujan yang berkepanjangan	12	Cuaca buruk	Produksi garam menurun	- Penyebaran informasi cuaca - Bantuan teknologi produksi garam	DKP	1 tahun
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Terjadinya kegagalan panen dan menurunnya produksi perikanan	12	- Cuaca ekstrim yang mengganggu budaiaya ikan - Cuaca buruk di laut	- Kematian ikan - Nelayan tidak dapat melaut - Kematian ikan - Menurunnya hasil tangkapan ikan di	- Penyebaran informasi kondisi cuaca - Penyebaran informasi cuaca di laut	DKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran OPD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		tangkap		- Munculnya wabah penyakit ikan - Penurunan SDI di laut Jawa - Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan - Pencatatan produksi yang kurang cermat	laut - Menurunnya populasi jenis ikan tertentu - Data produksi belum sesuai	- Pengendalian hama penyakit ikan - Membuat terumbu karang buatan - Sosialisasi dan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan - Melakukan validasi data		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2024. Rencana tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah

TABEL 4.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH															
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													51.400.687.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											50.599.009.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	50.599.009.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								50.599.009.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	50.599.009.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.906.850.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	1	45.906.850.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					44.832.270.000		
										Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	327	44.832.270.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.02.0002				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					917.580.000		
										Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	917.580.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.02.0005				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					157.000.000		
										Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	157.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.03.0002				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					100.000.000		
										Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						315.000.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	315.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0003				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					15.000.000		
										Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.05.0005				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					150.000.000		
										Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.05.0009				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					150.000.000		
										Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.121.546.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	1.121.546.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		
										Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				215.125.000		
										Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	215.125.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				77.870.000		
										Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	77.870.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000		
										Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				631.551.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	631.551.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.000.000		
										Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				14.000.000		
										Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.067.613.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Unit	1	1.067.613.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.0003					Pengadaan Alat Besar				-		
										Jumlah unit alat besar yang disediakan	Unit		-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				507.613.000		
										Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	507.613.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.07.0009					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				300.000.000		
										Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				260.000.000		
										Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.438.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	1.438.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					430.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08.0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.000.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12		1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						650.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0001				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					280.000.000		
									Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1		280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0005				Pemeliharaan Mebel					5.000.000		
									Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1		5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0008				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					50.000.000		
									Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					240.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0010				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		
									Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah											801.678.000		
			Indeks Manajemen Risiko								Angka	82	801.678.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								801.678.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah					%	100	801.678.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						801.678.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100	801.678.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Target (13)	Rp (14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				399.178.000		
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	399.178.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				402.500.000		
										Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	402.500.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH													51.400.687.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Target (13)	Rp (14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan													1.137.715.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)										Angka	107,78		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan											1.137.715.000		
			Nilai Tukar Nelayan								Angka	105	1.137.715.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								1.137.715.000		
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan					Angka	108,27	1.137.715.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				3.25.03.1.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						1.137.715.000		
								Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan			Orang	10100	1.137.715.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
				3.25.03.1.01.0002					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				1.137.715.000		
										Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	Dokumen	0	6.935.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	Orang	10000	1.087.855.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan	Orang	50	32.670.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	Kelompok	1	10.255.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.03.1.02			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						-		
								Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi			Orang	60	-	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
				3.25.03.1.02.0003					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				-		
										Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	-	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan													44.225.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi										%	0,75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif											44.225.000		
			Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia [WPPNR] yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								%	62	44.225.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								44.225.000		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya					%	44,44	44.225.000	Bidang Perikanan Tangkap	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3.25.03.1.02			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						44.225.000		
								Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya			Lokasi	1	44.225.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
				3.25.03.1.02.0003					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				44.225.000		
										Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	Orang	100	44.225.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													19.923.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											19.923.766.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	19.923.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								19.923.766.000		
						Persentase produksi perikanan tangkap					%	5	19.923.766.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				3.25.03.1.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						17.617.430.000		
								Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan			Dokumen	3	17.491.025.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
				3.25.03.1.01.0002					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				17.491.025.000		
										Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	Kelompok	2	20.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhannya	Lokasi	1	17.470.740.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah produksi perikanan yang didaratkan			Ton	327350	126.405.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
				3.25.03.1.01.0001					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				126.405.000		
										Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	Kabupaten/Kota	34	126.405.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.03.1.02			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						2.306.336.000		
								Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan			Unit	240	1.221.336.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
				3.25.03.1.02.0003					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.221.336.000		
										Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	Unit	160	245.436.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	Unit	40	975.900.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan			%	0,25	1.085.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
				3.25.03.1.02.0003					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.085.000.000		
										Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	50	1.085.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Lokasi	0	-	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH													21.105.706.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	Rp	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan														Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)									Angka	107,78		Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)										1.245.075.000		
				Angka Konsumsi Ikan							kg/kapita/tahun	40,12	1.245.075.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
					3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							1.245.075.000		
							Jumlah produksi olahan ikan				Ton	160000	1.245.075.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
					3.25.06.1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						111.000.000		
								Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata			%	20	111.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
					3.25.06.1.01.0001				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		
										Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan	Orang	30	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					3.25.06.1.01.0003				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				91.000.000		
										Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	Kabupaten/Kota	35	91.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					3.25.06.1.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.114.075.000		
									Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi		Jenis	2	292.360.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
					3.25.06.1.02.0002				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				292.360.000		
										Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya	Orang	100	292.360.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
									Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahnya		Unit	5	289.670.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
					3.25.06.1.02.0002				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				289.670.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan	Orang	30	19.470.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
										Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	Paket	10	270.200.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
								Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan			Unit	35	532.045.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				3.25.06.1.02.0002					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				532.045.000		
										Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	2000	462.045.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
										Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	Orang	70	70.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				3.25.06.1.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						20.000.000		
								Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan			Dokumen	1	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
				3.25.06.1.03.0001					Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				20.000.000		
										Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	Orang	25	20.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan											68.970.000		
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan								Angka	110	68.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								68.970.000		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya					Angka	111,27	68.970.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				3.25.04.1.05			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						68.970.000		
								Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya			Orang	60	68.970.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				3.25.04.1.05.0007					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				68.970.000		
										Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi sosialisasi kelembagaan	Kelompok	1	17.360.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
										Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	Orang	40	51.610.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													2.775.595.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											2.775.595.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	2.775.595.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								2.775.595.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Produksi perikanan budidaya					Ton	600000	2.775.595.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				3.25.04.1.01			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						249.650.000		
								Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha			Orang	117	249.650.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				3.25.04.1.01.0002					Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				170.670.000		
										Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	5	115.730.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	Unit	10	43.520.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	1	11.420.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.04.1.01.0003					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				78.980.000		
										Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	Kabupaten/Kota	35	78.980.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				3.25.04.1.05			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.525.945.000		
								Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya			Jenis	2	2.525.945.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				3.25.04.1.05.0004					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				2.525.945.000		
										Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	30	2.525.945.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH													4.089.640.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan													715.287.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi										%	0,75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif											715.287.000		
			Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								%	62	715.287.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								715.287.000		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif					%	5	715.287.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				3.25.02.1.01			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						715.287.000		
								Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan			Lokasi	1	404.715.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3.25.02.1.01.0002					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				404.715.000		
										Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	Dokumen	1	404.715.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL			Orang	5	310.572.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
				3.25.02.1.01.0002					Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				310.572.000		
										Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	Dokumen	0	-	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Unit	0	-	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	Orang	200	179.955.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	Lokasi	5	130.617.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													970.245.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Garam											970.245.000		
			Produksi garam								Ton	133320	970.245.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								970.245.000		
							Persentase produksi garam				%	1	970.245.000	Bidang Kelautan dan Pulau-mulau Kecil	
				3.25.02.1.03			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						970.245.000		
								Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya			Kelompok	25	52.805.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
				3.25.02.1.03.0001					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				52.805.000		
										Jumlah petambak garam yang difasilitasi dan dibina	Orang	150	52.805.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan			Kelompok	4	89.750.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
				3.25.02.1.03.0001					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				89.750.000		
										Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	Orang	90	89.750.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya			Kelompok	5	814.890.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
				3.25.02.1.03.0001					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				814.890.000		
										Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	Jenis	1	526.100.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	Ha	15	288.790.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya			Lokasi	5	12.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
				3.25.02.1.03.0001					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				12.800.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	Kabupaten/Kota	9	12.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH													1.685.532.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan													741.642.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi										%	0,75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif											741.642.000		
			Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								%	62	741.642.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								741.642.000		
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan					%	70	741.642.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						652.604.000		
								Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Kelompok	35	164.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.01.0004					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				164.900.000		
										Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang Menerima Sarana dan prasarana	Kelompok	5	164.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP			Orang	18	54.040.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.01.0001					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				22.220.000		
										Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	22.220.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				17.270.000		
										Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	17.270.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0003					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				14.550.000		
										Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	60	14.550.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil			%	100	433.664.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.01.0001					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				15.830.000		
										Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	%	100	15.830.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				311.519.000		
										Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	%	100	311.519.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.01.0003					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				106.315.000		
										Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	%	100	106.315.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						89.038.000		
								Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP			Orang	180	14.870.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.02.0001					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				14.870.000		
										Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	14.870.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	0	-	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.02.0003					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				-		
										Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	0	-	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
								Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya			%	100	74.168.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.02.0001					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				13.693.000		
										Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	13.693.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				26.425.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	26.425.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
				3.25.05.1.02.0003					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				34.050.000		
										Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	34.050.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
JUMLAH													741.642.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													898.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											898.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	898.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								898.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	898.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						11.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					7.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						867.200.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	867.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				865.200.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	865.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.800.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	19.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.800.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	1.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													1.270.316.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											1.270.316.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	1.270.316.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								1.270.316.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung					%	100	1.270.316.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1.270.316.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	6	113.011.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				113.011.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	3500	9.825.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	3000	40.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	30.186.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	0	33.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	5	123.269.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				123.269.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	3000	79.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	10	44.069.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	42,86	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				60.960.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	100	74.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.600.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	74.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	25	183.876.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				183.876.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3000	183.876.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	3,7	714.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				714.600.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	714.600.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
JUMLAH													2.168.316.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													316.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											316.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	316.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								316.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	316.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						224.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	224.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				216.500.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	216.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.500.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	55.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.500.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	36.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				21.500.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	21.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													631.375.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											631.375.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	631.375.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								631.375.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo					%	100	631.375.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						631.375.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	9	508.710.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				508.710.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2700	284.392.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	200.368.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	7.950.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
								Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan			Jenis	7	19.425.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				19.425.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2700	1.550.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	17.875.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	29	94.340.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				94.340.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	94.340.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	65	1.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				1.440.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	0	1.440.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	85	6.660.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				6.660.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30000	6.660.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	6	800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				800.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	800.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
JUMLAH													947.375.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													172.000.000		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											172.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	172.000.000		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								172.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	172.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	16.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119.800.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	119.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.800.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	117.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.700.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	35.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													587.181.000		
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1			
		Meningkatnya Produksi Perikanan											587.181.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	587.181.000		
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								587.181.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa					%	63,63	587.181.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						587.181.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	5	31.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.215.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	60	16.600.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	45	6.555.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	4.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	45	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2024				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	3	26.791.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				26.791.000			
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	50	12.025.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	60	14.766.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	40	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000			
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	50	107.975.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				107.975.000			
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	107.975.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	50	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B		
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				50.000.000			
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	50	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	65	331.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				331.200.000			
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	50	331.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA	
JUMLAH														759.181.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2024				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													154.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											154.000.000			
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	154.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								154.000.000			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	154.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A		
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.000.000			
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000			
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	53.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71.000.000		
								Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal			Unit	1	71.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													1.805.895.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											1.805.895.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	1.805.895.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								1.805.895.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak					%	81	1.805.895.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1.805.895.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	6	1.177.385.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.177.385.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	1.097.195.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	50	10.440.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	61.250.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	8.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
								Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan			Jenis	4	23.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				23.275.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	150	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	13.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	42	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				8.775.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	55	210.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				210.000.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	210.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	20	-	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				-		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	0	-	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	7	386.460.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				386.460.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilannya dan kompetensinya	Orang	1	386.460.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
JUMLAH													1.959.895.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													90.000.000		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											90.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	90.000.000		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								90.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						14.640.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(15)	(16)
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	14.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.640.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.360.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	45.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.360.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	39.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													886.910.000		
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1			
		Meningkatnya Produksi Perikanan											886.910.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	886.910.000		
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								886.910.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang					%	62,62	886.910.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						886.910.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	6	75.940.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				75.940.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	50	13.435.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	5	14.865.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	17.640.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
								Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan			Jenis	6	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2000	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	43	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	20	74.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				74.990.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	74.990.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	46	325.570.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				325.570.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	325.570.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	6	11.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				11.910.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	60	11.910.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	18	358.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				358.500.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	358.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
JUMLAH													976.910.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													168.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											168.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	168.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								168.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	168.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						78.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.500.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	15.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				57.500.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	57.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													1.255.369.000		
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1			
		Meningkatnya Produksi Perikanan											1.255.369.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	1.255.369.000		
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								1.255.369.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor					%	70	1.255.369.000		
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1.255.369.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	9	219.350.000		
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				219.350.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	4500	10.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	1000	170.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	19.700.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	19.650.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	6	34.290.000		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				34.290.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1000	16.740.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	2	17.550.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	5	20.000.000		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				20.000.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	50	458.710.000		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				458.710.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	458.710.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	5	20.000.000		
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				20.000.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3000	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	5	503.019.000		
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				503.019.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkatkan ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	503.019.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
JUMLAH													1.423.369.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												Target	Rp		
												(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													100.000.000		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											100.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	100.000.000		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								100.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	100.000.000		
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.500.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	9.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	33.000.000		
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				32.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	32.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	47.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	17.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													2.334.952.000		
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Produksi Perikanan											2.334.952.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	2.334.952.000		
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								2.334.952.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto					%	81,82	2.334.952.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						2.334.952.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	7	21.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				21.200.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	850	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	60	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	9.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	4	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				-		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	0	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	14	70.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				70.000.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	70.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	39	2.233.352.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				2.233.352.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	2.233.352.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	5	3.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				3.900.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10	3.900.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketramplilannya			%	9	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				6.500.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	6.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
JUMLAH													2.434.952.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2024				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													106.000.000			
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											106.000.000			
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	106.000.000			
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								106.000.000			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	106.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						20.000.000			
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B		
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000			
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000			
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8.000.000			
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	4	8.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.000.000			
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	42.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000			
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40.000.000			
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44.000.000			
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	44.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.000.000			
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	14.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000			
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	3	5.000.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG	
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													733.964.000		
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1			
		Meningkatnya Produksi Perikanan											733.964.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	733.964.000		
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								733.964.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong					%	72,72	733.964.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						733.964.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	5	301.660.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				301.660.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	5	68.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	30	14.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.860.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	5	36.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				36.500.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	30	11.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	70	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	14	54.404.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				54.404.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	54.404.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	40	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				-		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	5	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				-		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	0	-	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	20	341.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				341.400.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	341.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
JUMLAH													839.964.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													342.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											342.100.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	342.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								342.100.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	342.100.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						82.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	82.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20.000.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22.500.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		Laporan	12	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.600.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	189.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					186.600.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Laporan	12	186.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					25.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													1.366.749.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											1.366.749.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	1.366.749.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								1.366.749.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari					%	72	1.366.749.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						1.366.749.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	9	974.845.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				974.845.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2000	657.408.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	258.650.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	44.577.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	14.210.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	7	66.682.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				66.682.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1100	5.400.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	61.282.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	16	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	0	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	60	203.250.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				203.250.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	203.250.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	85	32.212.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				32.212.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	15000	32.212.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	15	82.560.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				82.560.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	82.560.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
JUMLAH													1.708.849.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													161.000.000		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											161.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	161.000.000		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								161.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	161.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						92.700.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	92.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.500.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.200.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	7.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.500.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	29.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	27.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.800.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	38.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.800.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	19.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													581.985.000		
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1			
		Meningkatnya Produksi Perikanan											581.985.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	581.985.000		
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								581.985.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan					%	72	581.985.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						581.985.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	5	65.295.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				65.295.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	140	30.220.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	10	17.725.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	8.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	9.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	3	25.005.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				25.005.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	110	18.545.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	42	6.460.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	20	18.805.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				18.805.000		
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	18.805.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	40	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				200.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	200.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	7	11.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				11.880.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10	11.880.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	30	261.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				261.000.000		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	261.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
JUMLAH													742.985.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													131.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											131.200.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	131.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								131.200.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	131.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						23.200.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	23.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.200.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	58.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				56.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	56.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													4.746.790.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											4.746.790.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	4.746.790.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								4.746.790.000		
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending					%	63	4.746.790.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				3.25.03.1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						4.746.790.000		
								Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan			Jenis	5	120.068.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				120.068.000		
										Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	23	73.860.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
										Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	108	21.233.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
										Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	9.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
										Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	15.400.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
								Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan			Jenis	7	351.868.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				351.868.000		
										Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	165	341.868.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
										Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	25	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
								Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			%	30	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
								Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik			%	54	4.272.854.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				4.272.854.000		
										Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	4.272.854.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
								Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi			%	50	2.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
				3.25.03.1.06.0002					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				2.000.000		
										Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	80	2.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
								Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya			%	20	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
				3.25.03.1.06.0003					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				-		
										Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	-	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
JUMLAH													4.877.990.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan													1.178.964.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi										%	0,75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif											1.178.964.000		
			Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								%	62	1.178.964.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								773.390.000		
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat					%	3,7	773.390.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				3.25.02.1.01			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						748.540.000		
								Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			Lokasi	2	342.248.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
				3.25.02.1.01.0003						Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			342.248.000		
										Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	62.740.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	218.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	61.508.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terhabilitasi			Ha	2	406.292.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
				3.25.02.1.01.0003					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				406.292.000		
										Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	291.292.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	5	115.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.02.1.02			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						24.850.000		
								Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu			%	100	24.850.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
				3.25.02.1.02.0003					Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				24.850.000		
										Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	24.850.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								405.574.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat					%	61	106.809.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						106.809.000		
								Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan			Kali	10	106.809.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				106.809.000		
										Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	23	106.809.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat					%	2	298.765.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						250.820.000		
								Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil			%	100	250.820.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.01.0001					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				28.261.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	28.261.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				215.099.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	215.099.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0003					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				7.460.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	10	7.460.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						47.945.000		
								Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			%	100	47.945.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.02.0001					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				21.235.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	20	21.235.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				9.420.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	9.420.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0003					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				17.290.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	17.290.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2024				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													138.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											138.280.000			
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	138.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								138.280.000			
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	138.280.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A		
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						19.665.000			
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	19.665.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					600.000			
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.355.000			
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	2.355.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16.710.000			
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.710.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.150.000			
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun		Laporan	1	45.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA			
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.950.000			
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					43.200.000			
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	43.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.465.000			
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	73.465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA		
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.765.000			
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	15.765.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.700.000			
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.700.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL		
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Target (13)	Rp (14)	(15)	(16)	
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL	
JUMLAH													1.317.244.000			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Target (13)	Rp (14)	(15)	(16)	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan													708.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Persentase luasan mangrove yang dirchabilitasi										%	0,75		Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif											708.533.000			
			Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia [WPPNR] yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								%	62	708.533.000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
				3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								300.554.000			
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan					%	1,39	300.554.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A		
				3.25.02.1.01			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						273.679.000			
								Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi			Ha	2	273.679.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN		
				3.25.02.1.01.0003				Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					273.679.000			
										Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	273.679.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				3.25.02.1.02			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						26.875.000			
								Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu			%	100	26.875.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN		
				3.25.02.1.02.0003				Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional					26.875.000			
										Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha	%	100	26.875.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								407.979.000			
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan					%	61	155.143.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A		
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						155.143.000			
								Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan			Kali	10	155.143.000	SEKSI PENGAWASAN		
				3.25.05.1.01.0002				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil					155.143.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	155.143.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan					%	2	252.836.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						78.573.000		
								Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil			%	100	78.573.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.01.0001					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				55.950.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	15	55.950.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				11.656.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	11.656.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0003					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				10.967.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	14	10.967.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						174.263.000		
								Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			%	100	174.263.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.02.0001					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya				63.900.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	63.900.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3.25.05.1.02.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				53.140.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	53.140.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0003					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.223.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Orang	30	57.223.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													77.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											77.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	77.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								77.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	77.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						15.260.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	15.260.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.100.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.160.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	30.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Laporan	12	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.240.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	31.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					8.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.000.000		
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				X.XX.01.1.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					16.240.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	1	16.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
JUMLAH													785.533.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan													1.277.668.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi										%	0,75		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif											1.277.668.000		
			Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan								%	62	1.277.668.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								792.224.000		
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur					%	3,7	792.224.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				3.25.02.1.01			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						758.999.000		
								Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola			Lokasi	2	424.557.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
				3.25.02.1.01.0003					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				424.557.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	80.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	318.897.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	24.860.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terchabilitasi			Ha	2	334.442.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
				3.25.02.1.01.0003					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				334.442.000		
										Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	20000	223.274.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	4	111.168.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.02.1.02			Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						33.225.000		
								Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu			%	100	33.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
				3.25.02.1.02.0003					Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional				33.225.000		
										Persentase Fasilitas pelayanan perizinan berusaha	%	100	33.225.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								485.444.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur					%	61	236.050.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						236.050.000		
								Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan			Kali	10	236.050.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				236.050.000		
										Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	236.050.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur					%	2	249.394.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				3.25.05.1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						116.275.000		
								Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil			%	100	116.275.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.01.0001					Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				54.115.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	30	54.115.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3.25.05.1.01.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				6.620.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	30	6.620.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.01.0003					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil				55.540.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	30	55.540.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						133.119.000		
								Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			%	100	133.119.000	SEKSI PENGAWASAN	
				3.25.05.1.02.0001					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				41.815.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhanpada usaha penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	41.815.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0002					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya				42.470.000		
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	42.470.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.05.1.02.0003					Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				48.834.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	30	48.834.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													94.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											94.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	94.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								94.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						24.240.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	24.240.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				420.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	420.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI	
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.270.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.270.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI	
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.550.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.300.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	39.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI	
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				39.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.460.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	30.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.510.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.950.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
JUMLAH													1.371.668.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													276.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											276.500.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	276.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								276.500.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	276.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						22.500.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	22.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	101.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	100.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	153.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				136.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	136.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													853.195.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											853.195.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	853.195.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								853.195.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan					%	100	853.195.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				3.25.04.1.05			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						853.195.000		
								Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani			Kasus	350	447.150.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
				3.25.04.1.05.0006					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				447.150.000		
										Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	Kabupat en/Kota	35	45.070.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Lokasi	19	389.480.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Orang	350	12.600.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Persentase Pengguna Layanan Pengujian			%	20	391.045.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
				3.25.04.1.05.0007					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				391.045.000		
										Jumlah Parameter Pengujian	Unit	1	150.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	250	59.337.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	Sertifikat	2	181.708.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya			%	29	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Target (13)	Rp (14)	(15)	(16)
				3.25.04.1.05.0007					Pembinaan dan Pemantapan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				15.000.000		
										Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	Jenis	5	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH													1.129.695.000		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Target (13)	Rp (14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													608.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											608.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	608.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								608.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	608.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
										Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
										Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
										Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						458.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	458.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				453.000.000		
										Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	453.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	117.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
										Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		
										Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		
										Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan													9.976.701.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan										%	1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Perikanan											9.976.701.000		
			Produksi perikanan								Ton	927350	9.976.701.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								9.976.701.000		
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut					%	5	9.976.701.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				3.25.04.1.05			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						2.173.755.000		
								Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut			Jenis	1	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
				3.25.04.1.05.0007					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				20.000.000		
										Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	5	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya			Lokasi	1	2.153.755.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
				3.25.04.1.05.0002					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.582.400.000		
										Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangun	Unit	1	1.582.400.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.04.1.05.0004					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				571.355.000		
										Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	1500	571.355.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				3.25.04.1.06			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						7.802.946.000		
								Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya			Lokasi	9	7.802.946.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
				3.25.04.1.06.0002					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7.802.946.000		
										Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	Ekor	100000	41.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	Unit	9	2.490.905.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	30000000	345.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	Ekor	5000	2.767.380.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	10000	2.158.661.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH												10.584.701.000			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan													1.167.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)										Angka	107,78		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)											1.167.950.000		
			Angka Konsumsi Ikan								kg/kapita/tahun	40,12	1.167.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								1.167.950.000		
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan					%	4	1.167.950.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				3.25.06.1.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						1.167.950.000		
								Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan			Sertifikat	400	993.163.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
				3.25.06.1.02.0002					Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				993.163.000		
										Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	Dokumen	1	864.473.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memadai	Paket	2	118.690.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
										Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	Unit	2	10.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
								Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan			Sertifikat	100	63.745.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
				3.25.06.1.02.0001					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				63.745.000		
										Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	Unit	80	63.745.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)			Dokumen	1	111.042.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
				3.25.06.1.02.0001					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				111.042.000		
										Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	Dokumen	2	73.337.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Dokumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifikasi	Dokumen	5	14.885.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	Orang	20	22.820.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah													253.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2024			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)										Angka	82		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah											253.000.000		
			Indeks Kepuasan Masyarakat								Angka	83	253.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								253.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah					%	100	253.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.000.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000		
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.06.0002				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.000.000		
									Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.06.0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.000.000		
									Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.000.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	1	203.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
				X.XX.01.1.08.0002				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					200.000.000		
									Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.000.000		
									Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0006				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		
									Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				X.XX.01.1.09.0009				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000		
									Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
JUMLAH													1.420.950.000		

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Ikan	Tidak Semua UPI Terdata	12	Tidak Semua Produk Olahan Terdata	Data Produksi Tidak Valid	Pendataan	Bidang Usaha Dan Pengembang an Komoditas	1 Tahun
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Unit Pengolahan Ikan Yang Terdata	Tidak Semua UPI Terdata	9	UPI Tidak Mempunyai Ijin	Pembinaan UPI Tidak Optimal	Sosialisasi	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKAS I PRODUK	1 Tahun
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan	Jumlah Jenis Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dan	Peserta Tidak Mendapat Ketrampilan Dan	9	Jenis Ketrampilan Dan Kompetensi Terbatas	Ketrampilan Dan Kompetensi Peserta Tidak Meningkat	Sosialisasi	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar	Kompetensi	Kompetensi Yang Baru					DIVERSIFIKAS I PRODUK	
	Jumlah Poklahsar Yang Meningkat Usahnya	Poklahsar Tidak Mengikuti Pembinaan	9	Tidak Ada Pembinaan Usaha Kepada Poklahsar	Usaha Poklahsar Tidak Meningkat	Sosialisasi	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKAS I PRODUK	1 Tahun
	Jumlah Usaha Kelautan Dan Perikanan Yang Dipromosikan	Tidak Terdapat Data Lengkap Usaha KP	9	Tidak Ada Promosi Usaha KP Kepada Masyarakat	Usaha KP Tidak Dikenal Masyarakat	Sosialisasi	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKAS I PRODUK	1 Tahun
Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemetaan Dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Tidak Semua Logistic HP Terdata	12	Tidak Ada Data Mutakhir Logistic HP	Distribusi Logistik HP Tidak Terpantau Dan Tidak Terpetakan	Pendataan	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKAS I PRODUK	1 Tahun
	Persentase Dokumen Kelayakan Mutu Yang Diterbitkan	Pengolah Hasil Perikanan Kesulitan Memenuhi Standar	12	Pelaku Usaha Pengolahan Tidak Menerapkan Kelayakan Mutu	Produk Perikanan Tidak Bermutu	Pembinaan	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mutu						
Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) Yang Diterbitkan Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Hasil Perikanan	Pengujian Mutu Produk Hasil Perikanan Masih Belum Disyaratkan	12	Tidak Semua Hasil Perikanan Diuji Mutu	Hasil Perikanan Tidak Teruji Mutunya	Sosialisasi	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	1 Tahun
	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) Yang Diterbitkan	GMP Produk Hasil Perikanan Masih Belum Memasyarakat at	12	Tidak Semua Pelaku Usaha Menerapkan GMP	Hasil Perikanan Tidak Teruji Mutunya	Sosialisasi	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1 Tahun
	Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Kesulitan Pemenuhan Standar SNI	9	Produksi Perikanan Tidak Menerapkan SNI	Produk Perikanan Belum SNI	Sosialisasi	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Indeks Harga Yang Diterima Oleh Nelayan	Data Untuk Menghitung Indeks Tidak Valid	9	Penghitungan Indeks Tidak Valid	Indeks Harga Yang Diterima Nelayan Tidak Diketahui	Pendataan Produksi	BPS	1 Tahun
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Nelayan Yang Memperoleh Perlindungan	Nelayan Tidak Menjadi Peserta	12	Tidak Ada Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan	Nelayan Tidak Terlindungi Saat Melaut	Asuransi Nelayan	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Penjaminan		Uang Melaut			N	
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Nelayan Yang Meningkat Ketrampilan Dan Kompetensi	Data Nelayan Tidak Lengkap	12	Nelayan Tidak Mendapat Pembinaan Ketrampilan	Ketrampilan Nelayan Rendah	Sosialisasi	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Indeks Harga Yang Diterima Oleh Pembudidaya	Data Untuk Menghitung Indeks Tidak Valid	9	Penghitungan Indeks Tidak Valid	Indeks Harga Yang Diterima Pembudidaya Tidak Diketahui	Pendataan Produksi	BPS	1 Tahun
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Pembudidaya Ikan Yang Meningkat Keterampilannya	Data Pembudidaya Tidak Lengkap	9	Pembudidaya Tidak Mendapat Pembinaan Ketrampilan	Ketrampilan Pembudidaya Rendah	Sosialisasi	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Konservasi Yang Ditata Menuju Pengelolaan Yang Efektif	Penyusunan Aturan Pengelolaan Belum Siap	12	Kawasan Konservasi Tidak Tertata	Kawasan Konservasi Rusak	Penetapan Kawasan Pengelolaan	Bidang Kelautan Dan Pulau-Pulau Kecil	1 Tahun
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan	Jumlah Kawasan Konservasi Yang	Tidak Ada Usulan	12	Tidak Ada Dokumen	Tidak Ada Kawasan	Penetapan Kawasan	SEKSI PENGELOLAA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Ditetapkan	Kawasan Konservasi		Penetapan Konservasi	Konservasi Yang Ditetapkan	Pengelolaan	N RUANG LAUT	
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diverifikasi Persyaratan KKPRL	Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Persyaratan KKPRL	12	Pelaku Usaha Tidak Diverifikasi Persyaratan KKPRL	Pemanfaatan Ruang Laut Tidak Terkendali	Sosialisasi	SEKSI PENGELOLAA N RUANG LAUT	1 Tahun
	Persentase Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Barat	Tidak Tersedia Data Luas Wilayah Kerusakan Mangrove	12	Tidak Ada Rehabilitasi Kawasan Mangrove	Kerusakan Kawasan Mangrove Semakin Luas	Pendataan Kerusakan Kawasan Mangrove	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	1 Tahun
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi Yang Dikelola	Tidak Ada Usulan Pengelola Kawasan Konservasi	12	Tidak Ada Penetapan Pengelola Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi Tidak Dikelola Dengan Baik	Sosisalisasi	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
	Luasan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Yang Terehabilitasi	Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Tidak Terdada	12	Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Tidak Terehabilitasi	Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Semakin Luas	Sosialisasi Dan Pembinaan	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelayanan	Persyaratan Pemohon Izin	12	Pelayanan Perizinan Perlu	Perizinan Tidak Terlayani	Sosialisasi	SEKSI KONSERVASI,	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Perizinan Berusaha Yang Tepat Waktu	Tidak Lengkap		Waktu Lama			REHABILITASI DAN PERIZINAN	
	Persentase Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Selatan	Tidak Tersedia Data Luas Wilayah Kerusakan Mangrove	12	Tidak Ada Rehabilitasi Kawasan Mangrove	Kerusakan Kawasan Mangrove Semakin Luas	Pendataan Kerusakan Kawasan Mangrove	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	1 Tahun
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Luasan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Yang Terehabilitasi	Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Tidak Terdata	12	Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Tidak Terehabilitasi	Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Semakin Luas	Sosialisasi Dan Pembinaan	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Yang Tepat Waktu	Persyaratan Pemohon Izin Tidak Lengkap	12	Pelayanan Perizinan Perlu Waktu Lama	Perizinan Tidak Terlayani	Sosialisasi	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
	Persentase Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Timur	Tidak Tersedia Data Luas Wilayah Kerusakan Mangrove	12	Tidak Ada Rehabilitasi Kawasan Mangrove	Kerusakan Kawasan Mangrove Semakin Luas	Pendataan Kerusakan Kawasan Mangrove	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi Yang Dikelola	Tidak Ada Usulan Pengelola Kawasan Konservasi	12	Tidak Ada Penetapan Pengelola Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi Tidak Dikelola Dengan Baik	Sosisalisasi	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
	Luasan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Yang Terehabilitasi	Luasan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Yang Terehabilitasi	12	Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Tidak Terdata	Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Tidak Terehabilitasi	Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil Semakin Luas	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi	Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Yang Tepat Waktu	Persyaratan Pemohon Izin Tidak Lengkap	12	Pelayanan Perizinan Perlu Waktu Lama	Perizinan Tidak Terlayani	Sosialisasi	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Lokasi Yang Dilindungi Sumber Daya Ikannya	Penggunaan API Yang Tidak Ramah Lingkungan	12	Rusaknya Sumberdaya Ikan	Hilangnya Sumberdaya Ikan	Sosialisasi Dan Bantuan API Ramah Lingkungan	Bidang Perikanan Tangkap	1 Tahun
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas	Jumlah Lokasi Yang Dilindungi SDI Nya	Penggunaan API Yang Tidak Ramah Lingkungan	12	Rusaknya Lokasi SDI	Menurunnya SDI	Sosialisasi Dan Bantuan API Ramah Lingkungan	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Diawasi Dari Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Barat	Periode Patroli Pengawasan Yang Rendah	12	Tidak Terawasinya WPPNRI	Kasus IUU Meningkat	Peningkatan Patroli Pengawasan	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Patroli Pengawasan Dengan Speadboat Yang Dilaksanakan	Operasional Kapal Pengawasan Yang Mahal	12	Rendahnya Patroli Pengawasan SDKP	Kerusakan SDKP	Penambahan Anggaran Operasional Kapal Pengawasan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Diawasi Dari Illegal, Unreported	Periode Patroli Pengawasan Yang Rendah	12	Tidak Terawasinya WPPNRI	Kasus IUU Meningkat	Peningkatan Patroli Pengawasan	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Selatan							
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Patroli Pengawasan Dengan Speadboat Yang Dilaksanakan	Operasional Kapal Pengawasan Yang Mahal	9	Rendahnya Patroli Pengawasan SDKP	Kerusakan SDKP	Penambahan Anggaran Operasional Kapal Pengawasan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Diawasi Dari Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Timur	Periode Patroli Pengawasan Yang Rendah	9	Tidak Terawasinya WPPNRI	Kasus IUU Meningkat	Peningkatan Patroli Pengawasan	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Patroli Pengawasan Dengan Speadboat Yang Dilaksanakan	Operasional Kapal Pengawasan Yang Mahal	9	Rendahnya Patroli Pengawasan SDKP	Kerusakan SDKP	Penambahan Anggaran Operasional Kapal Pengawasan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Pelaku Usaha Tidak Memahami Undang-Undang	12	Usaha Tidak Sesuai Undang-Undang	Pelanggaran Undang-Undang	Sosialisasi	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif Yang Dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pokmaswas Tidak Aktif	12	SDKP Tidak Terawasi	Rusaknya SDKP	Pembinaan	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	1 Tahun
	Jumlah Pelaku Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil Yang Mengetahui Peraturan Perundangan Sektor KP	Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Undang-Undang	12	Usaha Tidak Sesuai Undang-Undang	Pelanggaran Undang-Undang	Sosialisasi	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Sampai Dengan 12 Mil	Rendahnya Periode Operasi Pengawasan	12	Kurangnya Operasi Pengawasan	Pelaku Usaha Melanggar Peraturan	Peningkatan Operasi Pengawasan	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Sektor Perikanan Di Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya Yang Mengetahui Peraturan Perundangan Sektor KP	Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Undang-Undang	12	Usaha Tidak Sesuai Undang-Undang	Pelanggaran Undang-Undang	Sosialisasi	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Penanganan Pelanggaran Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi Sesuai Kewenangannya	Rendahnya Periode Operasi Pengawasan	12	Kurangnya Operasi Pengawasan	Pelaku Usaha Melanggar Peraturan	Peningkatan Operasi Pengawasan	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	1 Tahun
	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Barat	Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Peraturan	12	Kasus Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Sosialisasi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan 12 Mil	Petugas Tidak Kompeten	12	Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Pelatihan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Petugas Tidak Kompeten	12	Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Pelatihan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun
	Persentase Penurunan Kasus	Pelaku Usaha Tidak	12	Kasus Pelanggaran	Pelaku Usaha Tidak Patuh	Sosialisasi	Kantor Cabang Dinas	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Selatan	Mengetahui Peraturan		Tidak Tertangani	Peraturan		Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan 12 Mil	Petugas Tidak Kompeten	12	Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Pelatihan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Petugas Tidak Kompeten	12	Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Pelatihan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya							
	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Kerja Cabdin Wilayah Timur	Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Peraturan	12	Kasus Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Sosialisasi	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan 12 Mil	Petugas Tidak Kompeten	12	Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Pelatihan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun
Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu)	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Petugas Tidak Kompeten	12	Pelanggaran Tidak Tertangani	Pelaku Usaha Tidak Patuh Peraturan	Pelatihan	SEKSI PENGAWASAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Daerah Provinsi	Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan		1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum,	Pegawai Tidak	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Kompeten			Terpenuhi		Pantai Wonokerto Kelas B	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan		1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan		1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administarsi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan		1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan		1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administarsi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan		1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan		1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administarsi	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan		1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan		1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan		1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sesuai Standar Layanan							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan		1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	SEKRETARIAT	1 Tahun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	9	Dokumen Administrasi Keuangan Tidak Lengkap	Laporan Keuangan Tidak Akuntabel	Pelatihan	SUB BAGIAN KEUANGAN	1 Tahun
Administrasi Barang Milik Daerah Pada	Jumlah Jenis Dokumen	Pegawai Tidak	9	Dokumen Administrasi	Laporan Keuangan Tidak	Pelatihan	SUB BAGIAN UMUM DAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kompeten		BMD Tidak Lengkap	Akuntabel		KEPEGAWAIA N	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N	1 Tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan	Harga Barang Lebih Mahal	10	Fraud Pembelian BMD	Kualitas BMD Rendah	Pengawasan Internal	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Daerah	Pemerintahan Daerah Yang Disusun						N	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Pemeliharaan	Barang Tidak Terdata	6	Barang Tidak Dilakukan Perawatan	Barang Rusak	Pendataan	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIA N	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Daerah	Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal							
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perangkat Daerah						Kelas B	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah						Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan	Pegawai Tidak	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Kompeten						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Layanan							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Pegawai Tidak	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Kompeten			Terlaporkan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
	Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Daerah	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Lambat	Operasional Kedinasan Tidak Terpenuhi	Pelatihan	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	1 Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Sesuai Standar Layanan	Pegawai Tidak Kompeten	9	Pelayanan Tidak Sesuai Standar	Standar Layanan Buruk	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Pegawai Tidak Kompeten	4	Laporan Tidak Disusun	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Terlaporkan	Pelatihan	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Mengukur Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat	Pengukuran Hanya Secara Internal	12	Tidak Dilakukan Pengukuran Kualitas Layanan	Kualitas Layanan Buruk	Pengukuran Eksternal	SUB BAGIAN TATA USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Daerah	Daerah Baik Secara Internal Maupun Eksternal							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Ketercapaian Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah Tidak Dipantau Secara Rutin	12	Tidak Dilakukan Pengendalian Kinerja	Kinerja Tidak Tercapai	Dilakukan Rapat Pengendalian	SEKRETARIAT	1 Tahun
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundangan	Penyusunan Melebihi Waktu Yang Tersedia	10	Dokumen Tidak Lengkap	Dokumen Tidak Tersusun	Pemantauan Secara Berkala	SUB BAGIAN PROGRAM	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Produksi Garam	Cuaca Hujan Berkepanjan gan	12	Petambak Garam Tidak Dapat Berproduksi	Produksi Garam Turun	Penggunaan Teknologi Produksi Garam	Bidang Kelautan Dan Pulau-Pulau Kecil	1 Tahun
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah KUGAR Yang Meningkat Kompetensinya	KUGAR Tidak Terbina	9	Produktifitas KUGAR Rendah	Produksi Garam Turun	Pelatihan	SEKSI PEMBERDAYA AN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan	Kelompok Masyarakat Pesisir Tidak Mendapat Pelatihan	9	Kelompok Masyarakat Pesisir Tidak Trampil	Kelompok Masyarakat Pesisir Tidak Sejahtera	Pendataan Dan Pelatihan	SEKSI PEMBERDAYA AN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 Tahun
	Jumlah KUGAR Yang Meningkat Teknologinya	KUGAR Tidak Terbina	9	Produktifitas KUGAR Rendah	Produksi Garam Turun	Pelatihan	SEKSI PEMBERDAYA AN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 Tahun
	Jumlah Sentra Garam Rakyat Yang Didata Potensinya	Petambak Garam Tidak Terdata	9	Pendataan Tidak Lengkap	Data Produksi Garam Tidak Valid	Pendataan	SEKSI PEMBERDAYA AN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Asemdayong	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras		1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	Pelabuhan Perikanan Pantai	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pelabuhan Perikanan Provinsi	Dilaksanakan			Tidak Dapat Dilaksanakan			Asemdayong Kelas B	
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Befungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas		1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi		1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkat Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM		1 Tahun
	Persentase Ketercapaian	SDM Tidak Cakap Dan	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras	Nelayan Tidak Dapat Melaut	Pelatihan Dan Pemenuhan	Pelabuhan Perikanan	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pelayanan Kepelabuhanan PPP Bajomulyo	Sarpras Terbatas		Tidak Memadai	Dan Mendaratkan Ikan	Sarpras	Pantai Bajomulyo Kelas A	
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND ARAN	1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laut/Asuransi	i					ARAN	
	Persentase SDM Yang Meningkat Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Karimunjawa	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras		1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas		1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perikanan Yang Berfungsi Baik							
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asuransi	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi		1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM		1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras		1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan		1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pengembangan Pelabuhan Perikanan							
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas		1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi		1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM		1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Larangan	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras		1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas		1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi		1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM		1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PPP Lohgending				Ikan		Kelas A	
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND ARAN	1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND ARAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Morodemak	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Berfungsi Baik							
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asuransi	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tasikagung	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Dokumen	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen	Pelabuhan Tidak Dapat	Pendataan	SEKSI TATA KELOLA DAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan			Pendukung	Berkembang		PELAYANAN USAHA	
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND ARAN	1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Tawang	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas		1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi		1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM		1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PPP Tegalsari				Ikan		A	
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND ARAN	1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asurans i	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBAND ARAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	1 Tahun
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan PPP Wonokerto	SDM Tidak Cakap Dan Sarpras Terbatas	12	Pelayanan Buruk Dan Sarpras Tidak Memadai	Nelayan Tidak Dapat Melaut Dan Mendaratkan Ikan	Pelatihan Dan Pemenuhan Sarpras	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	1 Tahun
Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Fungsi Pelayanan Pemerintahan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Jumlah Fungsi Pengusahaan Yang Dilaksanakan	Keterbatasan SDM Dan Sarpras	12	Pengusahaan Tidak Dapat Dilaksanakan	Kepeluan Nelayan Dan Pelaku Usaha Tidak Terlayani	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan		1 Tahun
	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Data Tidak Lengkap	6	Tidak Ada Dokumen Pendukung	Pelabuhan Tidak Dapat Berkembang	Pendataan		1 Tahun
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Berfungsi Baik	Perawatan Fasilitas Kurang	12	Fasilitas Pelabuhan Rusak	Pelayanan Terganggu	Pemeliharaan Fasilitas		1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Keberangkatan Kapal Yang Dilengkapi Dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan Tidak Memahami Pentingnya PKL/Asuransi	9	Keselamatan Nelayan Tidak Terjamin	Produktifitas Nelayan Rendah	Sosialisasi		1 Tahun
	Persentase SDM Yang Meningkatkan Kompetensi Dan Ketrampilannya	SDM Tidak Kompeten Dan Tidak Trampil	12	SDM Tidak Cakap Dalam Melayani	Pelayanan Terganggu	Pelatihan SDM		1 Tahun
	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Menurunnya SDI	12	Produksi Perikanan Turun	Produksi Perikanan Tidak Mencapai Target	Pengelolaan SDI	Bidang Perikanan Tangkap	1 Tahun
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pelabuhan Yang Menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Tidak Mampu Memenuhi Standar	12	Pelabuhan Tidak Menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Pelayanan Pelabuhan Tidak Optimal	Pelatihan	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	1 Tahun
	Jumlah Produksi Perikanan Yang Didaratkan	Pendaratan Ikan Tidak Terdata	12	Data Produksi Tidak Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya	Data Produksi Perikanan Turun	Pendataan	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	1 Tahun
Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan	Jumlah Kapal Yang Menerapkan Dokumen Kapal Perikanan	Pemilik Kapal Tidak Mengetahui Kelengkapan Dokumen	12	Dokumen Kapal Tidak Lengkap	Kapal Tidak Dijinkan Melaut	Sosialisasi	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							ALAT TANGKAP	
	Persentase Kapal Perikanan Yang Menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Nelayan Tidak Mampu Menggunaka n Teknologi Penangkapan Ikan	10	Kapal Tidak Menggunakan Teknologi Penangkapan Ikan	Produksi Tidak Optimal	Sosialisasi Dan Pelatihan	SEKSI PENGENDALI AN PENANGKAPA N, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	Penyakit Ikan Tidak Tertangani	12	Penyakit Ikan Tidak Mampu Dideteksi Sejak Dini	Wabah Penyakit Ikan	Deteksi Dini Penyakit Ikan	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A	1 Tahun
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Yang Ditangani	Penyakit Ikan Tidak Terdeteksi	12	Penyakit Ikan Tidak Mampu Dideteksi Sejak Dini	Wabah Penyakit Ikan	Deteksi Dini Penyakit Ikan	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	1 Tahun
	Persentase Pengguna Layanan Pengujian	Penyakit Ikan Dianggap Tidak Berbahaya	10	Masyarakat Tidak Mengetahui Pentingnya Uji Kesehatan Ikan	Kesehatan Ikan Tidak Diuji	Sosialisasi	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALI AN DAN HAMA	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							PENYAKIT IKAN	
	Persentase Petugas Laboratorium Yang Meningkatkan Kompetensinya	Tidak Ada Pelatihan Kompetensi Secara Rutin	12	Tidak Ada Peningkatan Kompetensi Petugas Laboratorium	Petugas Laboratorium Tidak Kompeten	Pelatihan	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	1 Tahun
	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	Balai Belum Mengadopsi Teknologi Budidaya Terbaru	12	Budidaya Air Laut Menggunakan Teknologi Lama	Rendahnya Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Peningkatan Teknologi Budidaya	Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A	1 Tahun
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan Yang Diikuti Tenaga Teknis SDM Loka Air Laut	Tidak Dilakukan Pelatihan Secara Kontinyu	12	Petugas Tidak Trampil	Produksi Turun	Pelatihan	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	1 Tahun
	Jumlah Lokasi Loka Air Laut Yang Direhabilitasi Sarprasnya	Kerusakan Sarpras Loka Air Laut	12	Sarpras Budidaya Rusak	Produksi Turun	Rehab Sarpras	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	1 Tahun
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Perairan Darat	Jumlah Loka Yang Direhabilitasi Sarprasnya	Kerusakan Sarpras Loka	12	Sarpras Budidaya Rusak	Produksi Turun	Rehab Sarpras	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN	1 Tahun

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							TEKNOLOGI	
	Produksi Perikanan Budidaya	Pembudidaya Beralih Usaha	12	Mahalnya Pakan Buatan Pabrik	Produksi Perikanan Budidaya Turun	Penggunaan Pakan Mandiri		1 Tahun
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Yang Menerapkan Ijin Usaha	Pembudidaya Tidak Memahami Jenis Ijin Usaha	12	Rumitnya Persyaratan Perijinan	Pembudidaya Tidak Berijin	Sosialisasi	SEKSI PENGEMBAN GAN KOMODITAS	1 Tahun
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Teknologi Budidaya Yang Diterapkan Oleh Pembudidaya	Pembudidaya Masih Menggunaka n Teknologi Lama	10	Produktifitas Pembudidaya Rendah	Produksi Perikanan Budidaya Tetap	Pelatihan	SEKSI PENGEMBAN GAN KOMODITAS	1 Tahun

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Penyusunan Renja Tahun 2024 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi. Renja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcome*) dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja, diperlukan segenap pihak yang terlibat hendaknya juga dapat "duduk bersama" dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam tahapan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, niat dan cita-cita luhur yang tertuang dalam indikator kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah diharapkan akan memberikan peningkatan dan kemajuan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah.